



Partai Politik Dalam Perspektif Regulasi Dan Implementasi Keterwakilan Perempuan (Studi Pada Partai PKB, PDI-P, GOLKAR Kota Probolinggo)

Veronica Sri Astuti Nawangsih

Universitas Panca Marga

Husni Mubaraq

Universitas Panca Marga

Binti Nasikhatul Ummatin

Universitas Panca Marga

Alamat: Universitas Panca Marga Jl. Raya Dringu, Krajan, Pabean, Kec. Mayangan,
Kota Probolinggo, Jawa Timur 67216

Korespondensi penulis: ichaumma31@gmail.com

***Abstract.** Political parties as a forum that accommodates and distributes people's aspirations are an important component in the advancement of gender equality in Indonesia, as we know that gender issues are many unresolved problems, women's involvement in political participation in parties has become one of the the key to successful implementation of gender in Indonesia.*

***Keywords:** political parties, gender equality, political participation*

Abstrak. Partai politik sebagai wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat menjadi salah satu komponen penting dalam kemajuan kesetaraan gender di Indonesia, seperti yang telah kita ketahui bahwa permasalahan gender merupakan permasalahan alot yang tak kunjung selesai, keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik di tubuh partai kemudian menjadi salah satu kunci keberhasilan penerapan kesetaraan gender di Indonesia.

Kata kunci: partai politik, kesetaraan gender, partisipasi politik

LATAR BELAKANG

Upaya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia harus dilihat dalam konteks transisi bangsa Indonesia menuju sistem politik yang lebih demokratis. Inti dari demokrasi adalah mengejar kesetaraan politik bagi semua warga negara, termasuk kelompok yang terpinggirkan dan minoritas. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia secara demografis adalah perempuan, mereka hanyalah mayoritas yang diam - kelompok besar yang terpinggirkan secara politik, sosial budaya dan ekonomi - dan seringkali absen dari proses pengambilan keputusan.

Sistem pemilu merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen. Oleh karena itu, tindakan khusus sementara pada masa reformasi diatur dalam bentuk tindakan afirmatif, atau kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon. Upaya afirmasi yang tertuang dalam kebijakan legislatif terbukti efektif meningkatkan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga legislatif, khususnya DPR.

Seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo (Cholisin, 2007), partisipasi politik secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan individu atau kelompok yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Yakni, memilih pemimpin nasional dan mempengaruhi kebijakan secara langsung atau tidak langsung (Tatanan Umum). Kegiatan tersebut meliputi kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menghadiri partai politik atau kelompok kepentingan, dan berinteraksi dengan pejabat pemerintah atau legislator.

Kajian ini berfokus pada implementasi kebijakan kuota 30% perempuan di partai politik, yang pada akhirnya akan memiliki keterkaitan dengan jumlah perempuan di parlemen.

KAJIAN TEORITIS

1. Partai Politik

Partai politik berada di bawah kendali pemerintah berdasarkan undang-undang no. 31/2002, UU No. 2 Tahun 2008 dan UU terbaru no. 2 Tahun 2011. Partai politik berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memiliki arti hukum yang diatur dalam Bab 1 UU No. Ketentuan umum sebagai organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang Indonesia tanpa paksaan, berdasarkan keinginan dan harapan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, dan negara, serta melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia.

2. Kesetaraan Gender

Konsep gender pertama kali dihadirkan sebagai perjuangan radikal, konservatif, sekuler dan religius untuk mengekspresikan perempuan di Amerika pada tahun 1960-an dan kemudian diberikan kesadaran gender (Mufidah, 2018).

Menurut (Sasongko, 2009), beberapa teori digunakan untuk menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender, antara lain teori nurture, teori nature, dan teori equilibrium

a. Teori Nurture

Menurut teori nurture, perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki muncul karena struktur sosial dan budaya. Konsekuensi perbedaan peran dan fungsi Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan pengucilan dan pengusiran perempuan dari peran dan partisipasinya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara dan negara.

b. Teori Nature

Menurut teori ilmu alam, perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah wajar dan harus diterima. Perbedaan biologis ini memberikan petunjuk dan bukti adanya perbedaan fungsi dan fungsi kedua jenis kelamin.

c. Teori Equilibrium

Selain kedua perspektif tersebut, terdapat teori aliansi yang disebut ekuilibrium yang menekankan pada pengertian partisipasi dan persahabatan antara perempuan dan laki-laki. Sikap ini tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan bersama-sama dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa.

3. Partisipasi Politik Perempuan

Imawan (2003: 4-5) berpendapat bahwa partisipasi merupakan aspek terpenting dari demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. Tanpa masukan, sumber daya pemerintah gagal menciptakan rasa keadilan di antara warga negara. Ada tiga cara kita bisa terlibat. Pertama, semua warga negara memiliki hak yang sama atas kebebasan berekspresi dan kepercayaan dalam pengambilan keputusan. Memperhatikan kepentingan umum dan pemerintah.

Partisipasi politik adalah keikutsertaan, keterikatan atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Peran politik terkait erat dengan aktivitas politik, dari peran politisi aktivis, dari pemilu, dari kerja partai hingga protes. Partisipasi politik secara umum adalah kegiatan individu atau kelompok yang berperan aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan tersebut bisa berupa pemungutan suara, mengikuti partai politik, dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yang dalam pendekatan ini menggambarkan perilaku, pikiran, atau perasaan suatu kelompok atau individu. Dalam pendekatan deskriptif, peneliti menghubungkan perilaku yang diselidiki dengan variabel lain atau menyelidiki atau menjelaskan sebab-sebab secara sistematis, seperti deskripsi penelitian yang hanya menggambarkan.

Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan filosofi postpositivisme, digunakan untuk menyelidiki keadaan benda-benda alam, dimana penelitian adalah alat utama untuk pengambilan sampel sumber data yang disengaja dan longsor, pengumpulan dengan triangulasi (bersama-sama), Analisis data bersifat induktif, Kualitatif Deskriptif dan kualitatif temuan penelitian deskriptif lebih menekankan signifikansi daripada generalisasi.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis masalah, dan kemudian menarik kesimpulan dari masalah tersebut tentang partai politik dalam pespektif regulasi dan implementasi keterwakilan perempuan pada partai politik- partai politik yang ada di kota probolinggo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses pengumpulan data akan melakukan analisis terhadap semua data yang diperoleh dari hasil yang telah dilaksanakan seperti yang disajikan dalam bab sebelumnya . data yang diperoleh baik dari kegiatan observasi, wawancara maupun dokumentasi akan disajikan dengan teknik kualitatif deskriptif dengan tetap mengacu pada interpretasi data dan informasi sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

Penelitian berlokasi di DPRD Kota Probolinggo dengan fokus tiga partai yakni PKB, PDI-P dan GOLKAR sebagai 3 besar partai yang menduduki posisi penting di daerah kota probolinggo dan terbilang memiliki elektabilitas serta tingkat kepercayaan dari masyarakat yang cukup tinggi. Kemudian di fokuskan kembali dengan dilakukan wawancara terhadap kader perempuan tiap partai yang menduduki kursi legislative di kota probolinggo sebagai pelaku atau orang orang yang berperan dan mengetahui seluk beluk pengimplementasian keterwakilan perempuan pada tiap partai. Setelah dilakukan wawancara selanjutnya dilakukan analisis tentang implementasi keterwakilan perempuan dalam partai sesuai dengan teori serta indikator indikator yang telah dijabarkan diatas agar penelitian dapat disajikan secara sistematis.

A. Partai Politik

Perempuan terpilih dan memasuki dunia politik, partai politik berperan sebagai wahana untuk membawa harapan bagi masyarakat lokal dan sebagai wadah partisipasi politik.

Juga, partai politik adalah organisasi terorganisir yang anggotanya disebut disini atau disini disebut aktivis, yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan politik dan membangun kekuatan dan kekuatan politik yang sebelumnya dibangun oleh pimpinan partai.

B. Kesetaraan Gender

1. Teori nature

Hasil penelitian menyimpulkan kesepakatan bahwa perbedaan memang ada tetapi tidak dapat dimaknai dan diterapkan secara saklek atau kaku dalam dunia politik.

meyakini bahwa laki laki dan perempuan memiliki porsinya masing masing tetapi dalam hal politik hal ini kemudian menjadi hilang karna laki laki dan perempuan menjadi fleksibel dan harusnya tidak mengenal gender.

2. Teori nurture

Penelitian menghasilkan ketidak setujunya dengan adanya kesenjangan struktur sosial yang dirasakan kaum perempuan, hal ini mereka yakini sebagai penghambat kaum perempuan untuk maju.

Penulis pun memiliki pandangan yang serupa saat kesenjangan struktul sosial antara perempuan dan laki laki masih tinggi maka penulis meyakini selamanya perempuan tidak akan dapat menyetarai laki laki apabila hal ini tidak di hapuskan atau di minimalisirkan.

3. Teori equalibirium

Untuk mendapatkan keseimbangan dan kesetaraan maka diperlukan sinergi antara kaum laki laki dan perempuan dalam berpolitik kemduaia juga penempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan akan menghasilkan kesetaraan yang tidak berat sebelah atau cenderung memihak salah satunya.

Bagi penulis sendiri kesetaraan bukan berarti rasa superior atau rasa lebih unggul dari salah satu, akan tetapi keselarasan, keseimbangan, kesesuaian kemampuan antar tiap individunya.

C. Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi merupakan aspek terpenting dari demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. Tanpa masukan, sumber daya pemerintah gagal menciptakan rasa keadilan di antara warga negara.

Peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik ada dan semakin berkurang, tetapi dibatasi oleh sejumlah faktor. Lebih penting lagi, dunia politik adalah dunia masyarakat, dunia harta, dunia akal, dunia kebijaksanaan, dunia kebijaksanaan. , semuanya mengenakan pakaian pria dan wanita. Perempuan adalah "koki", mereka tidak bisa berpikir jernih, mereka tidak takut dengan resiko, dan semuanya menjadi fantasi bagi perempuan, sehingga mereka tidak berhak untuk berpartisipasi dalam politik. Jadi, dunia publik untuk laki-laki dan dunia domestik untuk perempuan.

partisipasi politik perempuan merupakan sebuah keharusan dalam demokrasi indonesia, karna itu merupakan hak bagia setiap warga negara dan siapa pun tidak boleh untuk menghilangkannya.

Penulis meyakini bahwa tanpa adanya salah satu partisipasi baik laki laki maupun perempuan maka demokrasi indonesia akan cacat, karna sejatinya demokrasi sendiri memberikan siapa pun kebebasan dengan batasan btasan tertentu yang sama dan seimbang tanpa pandang bulu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keterwakilan perempuan di parlemen akan menyeimbangkan pewarnaan kebijakan dan undang-undang dan kebijakan, anggaran dan pengawasan untuk kepentingan terbaik perempuan dan anak Milbrath dalam sistem politik Indonesia (2012:3.6).

sebutkan empat faktor yang dapat mendorong partisipasi politik:

Pertama, ada motivasi. Banyak orang masuk politik karena tergiur atau tertarik dengan karir, bisnis, hobi, kekayaan, dll. politik. Ada juga orang-orang yang didorong menduduki posisi atau jabatan tertentu, dalam organisasi politik yang sama, birokrat, serikat buruh, parlemen, lembaga publik dan sebagainya. Insentif ini sering mengakibatkan politisi memberikan "insentif" kepada kelompok lain untuk memfasilitasi tujuan mereka.

Politisi terus menggunakan aspek kompetisi ini untuk mendapatkan kesuksesan dan dukungan. Faktanya, tidak jarang menawarkan insentif ini kepada donor dengan cara yang mengabaikan norma atau moralitas politik, seperti: mendorong kebijakan moneter, membuat janji, target, persetujuan, dll. Terkadang kecerdasan, integritas, moral, bahkan karakter pribadi Anda terabaikan.

Kedua, masalah kepribadian. Menurut Milbrath, seseorang yang berjiwa sosial atau benar-benar menghargai isu-isu yang dihadapi masyarakat cenderung lebih fleksibel dan mau berpartisipasi dalam kegiatan politik. Masyarakat dengan sikap ini cenderung ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Ketiga, faktor karakter sosial yang mengikuti status sosial ekonomi seseorang. Faktor ini akan mencakup acak sikap, sikap dan perilaku dalam politik. Seseorang dengan status sosial ekonomi tinggi biasanya melakukan aktivitas politik untuk memenuhi kebutuhan akan promosi, penghargaan, uang, dan sebagainya.

Di sisi lain, masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah cenderung terlibat dalam kegiatan politik untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya, mendapatkan pekerjaan yang baik dan sebagainya. Oleh karena itu, politik sebagai intervensi dalam perjuangan bezaká masyarakat pada umumnya, yang berfungsi sebagai wadah pencarian kehidupan yang bermartabat bagi individu-individu tertentu. Alhasil, persepsi tuyenan pun ikut dimasukkan oleh publik karena ketidakjelasan peran dan fungsi dari lengan politik itu sendiri.

Keempat, faktor situasional dan politik yang melekat. Lingkungan politik yang terkondisi cenderung membuat setiap orang merasa senang dan nyaman untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Di sisi lain, situasi kacau atau tidak menguntungkan meragukan tindakan politik kota. Namun di sisi lain, tidak jarang Espunt menciptakan situasi yang tidak menguntungkan di bidang aktivitas politik untuk mencapai tujuan dan aspirasi tertentu.

Hal ini telah diterapkan oleh 3 partai yang peneliti pilih untuk diteliti terkait pengimplementasiannya terkait partisipasi politik perempuan, berdasarkan tulisan diatas, partisipasi politik pada dasarnya memiliki banyak macam, indikator terlaksananya pengimplementasian partisipasi politik perempuan dalam tubuh partai dapat ditandai dengan

1. Adanya kader perempuan dalam tubuh partai
2. adanya kegiatan yang mengikut sertakan peran perempuan dalam tubuh partai tersebut
3. keikutsertaan perempuan dalam struktural kepengurusan dalam tubuh partai
4. adanya partisipasi perempuan dalam pemilu

5. adanya upaya untuk mendukung kader perempuan dalam berpolitik, baik secara materil maupun non materil.

Hal ini telah peneliti temukan dalam tubuh setiap partai dibuktikan dengan wawancara langsung kepada narasumber yang berasal dari partai partai yang peneliti pilih untuk di teliti.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sampaikan rasa terima kasih kepada diri penulis, kepada pihak pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan jurnal ini baik secara materil maupun non materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Dengan penuh rasa syukur pada akhirnya jurnal ini telah selesai penulis rampungkan.

DAFTAR REFERENSI

- Al Banna, Hassan, 2002, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Intermedia.
- Anshari Thayib, dkk, 1997, *Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama*, Surabaya: Pusat Kajian Strategis dan Kebijakan (PKSK).
- Ballington, J. (2008). *Equality in Politics : A Survey of Women and Men in Parliaments (A. Mash, Ed.)*.
- Budiardjo, Miriam, 2002, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyadi Takariawan, 2002, *Fikih Politik Kaum Perempuan*, Yogyakarta: Tiga Lentera Utama.
- Cholisin, C. (2007). Karakteristik Kewarganegaraan yang Demokratis dalam Perspektif Demokrasi Pancasila. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*.
- Fransisca S.S.E. Seda, “*Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Bukan Jumlah Semata*”,
- Imran Hasibuan, dkk, 2015, *Gerak Sejarah Partai Banteng PNI, PDI, dan PDI Perjuangan*, Jakarta: DPP PDI PERJUANGAN
- J.I. Suryakusuma, 1988, *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*, Thesis Magister of Arts, Hague: Institute of Social
- Jawad, Haifa A., *Otentisitas Hak-Hak Perempuan, (Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender)*. Terj. Ani Hidayatun dkk. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2002 *Jurnal Perempuan dan International IDEA*.